



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
BIDANG PERTANAHAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama SOP	YOSA FATI TRIADHI ANDJIOE/ST.MM.MT NIP. 19691024 199003 1 007
	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahap Persiapan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	1. Memahami aturan-aturan terkait bidang Pertanahan
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	2. Memiliki kompetensi pembuatan kajian dan analisa produk hukum
3	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Surat Keluar	1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Persiapan rapat	2. Komputer
3. SOP pembuatan SK Tim	3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila penyusunan kebijakan tidak dibuat , maka akan menghambat pelaksanaan aturan baru yang seharusnya dilaksanakan.	Buku Agenda, Nota Dinas,

**SOP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHAP PERSIAPAN**

NO	KEGIATAN	Instansi yang mememlikan tanah	Bupati/Walikota	Gubernur	Dinas PRKP Prov. Kalbar	Tim Verifikasi	Tim Persiapan dan Tim Sekretariat	Tim Kajian Keberatan	kelengkapan dokumen	waktu pelaksanaan	out put
1	Mengajukan permohonan dari hasil Tahapan Perencanaan yang dilakukan instansi yang Memerlukan Tanah, dilakukan pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur								Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	1 hari	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
2	Gubernur Membentuk Tim Verifikasi, atau mendelegasikan ke Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan								DPPT dan dokumen pertimbangan pendelegasian langsung verifikasi	5 hari	Surat dan Nota Dinas
3	Bupati/Walikota menyurati Gubernur menerima pertimbangan pendelegasian								DPPT dan dokumen pertimbangan pendelegasian	3 hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Tim Verifikasi
4	SK Pendelegasian ke Bupati/Walikota dan disampaikan ke instansi yang Memerlukan Tanah								DPPT dan dokumen pertimbangan pendelegasian	3 hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Pendelegasian
5	DPPT diverifikasi Tim Verifikasi								DPPT dari instansi yang memerlukan tanah	5 hari	DPPT lengkap
6	Gubernur Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Persiapan								DPPT lengkap	5 hari	SK Tim Persiapan dan Sekretariat Persiapan
7	Tim Persiapan dan Sekretariat melaksanakan Rapat awal untuk penyusunan jadwal kegiatan								draf jadwal kegiatan	1 hari	Tersusunnya Jadwal Kegiatan Tim Persiapan
8	Melaksanakan Sosialisasi Rencana Pembangunan di lokasi (20 hk)								Undangan dan daftar hadir	20 hari	Berita Acara Sosialisasi daftar Hadir
9	Melaksanakan pendataan awal (30 hari)								Undangan dan daftar hadir	30 Hari	Tersusunnya Daftar Data Awal
10	Melaksanakan konsultasi publik (60 HK) dengan masyarakat di lokasi rencana pembangunan								Undangan dan daftar hadir	60 Hari	Berita Acara kesepakatan rencana pembangunan di lokasi
11	Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal								Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal	7 Hari	Surat, Nota Dinas, dokumen
12	Konsultasi Publik Ulang								Undangan dan daftar hadir	30 hari	Berita Acara kesepakatan rencana pembangunan di lokasi
13	Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan								Dokumen Berita Acara keberatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal	7 Hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Tim Kajian Keberatan
14	Rapat dan Hasil Berita Acara Kajian dan Tim Kajian Keberatan								Dokumen Berita Acara keberatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal	7 Hari	Surat, Nota Dinas, dokumen pembatalan/melanjutkan
15	Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan oleh Gubernur								Dokumen dan Berita Acara	7 Hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Penetapan Lokasi
16	Penyerahan SK Penetapan Lokasi kepada Instansi Yang memerlukan Tanah								SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	1 hari	SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
17	Mengumumkan Penetapan lokasi								Surat Pengumuman	7 Hari	Pengumuman Penetapan lokasi di Media Cetak dan di Pembangunan